

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

[Bid Dokkes Polda Banten](#) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan [Bid Dokkes Polda Banten](#) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada [Bid Dokkes Polda Banten](#) . Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, Oktober 2025
KABID DOKKES POLDA BANTEN

drg. IWANSYAH, Sp. Ort.
KOMBES POL NRP 73070725

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	v
II. Neraca	vi
III. Laporan Operasional	vii
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	viii
V. Catatan atas Laporan Keuangan	1
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bid Dokkes Polda Banten yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, Oktober 2025
KABID DOKKES POLDA BANTEN

drg. IWANSYAH, Sp. Ort.
KOMBES POL NRP 73070725

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan [Bid Dokkes Polda Banten](#) Triwulan III Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 September 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.831.363.328 atau mencapai 62,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.953.920.000.

Realisasi Belanja Negara per 30 September 2025 adalah sebesar Rp10.606.928.101 atau mencapai 70,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.946.962.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2025.

Nilai Aset per 30 September 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.132.187.085 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp689.113.584; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.443.073.501.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp607.150.314 dan Rp2.525.036.771.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp1.831.550.906, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp10.760.793.860 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai (Rp8.929.242.954). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp8.929.242.954).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas pada tanggal 01 Januari Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.982.234.397 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp8.929.242.954) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.472.045.328 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2025 adalah senilai Rp2.525.036.771.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 September 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BIDDOKKES POLDA BANTEN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Triwulan III Th 2025				Triwulan III Th 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah						
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	2.953.920.000	1.831.363.328	(1.122.556.672)	62,00	1.859.258.055
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		2.953.920.000	1.831.363.328	(1.122.556.672)	62,00	1.859.258.055
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	6.549.975.000	4.382.734.004	(2.167.240.996)	66,91	4.079.659.596
Belanja Barang	B.4	7.896.987.000	5.726.499.662	(2.170.487.338)	72,51	4.377.768.998
Belanja Modal	B.5	500.000.000	497.694.435	(2.305.565)	99,54	189.800.000
Jumlah Belanja		14.946.962.000	10.606.928.101	(4.340.033.899)	70,96	8.647.228.594

II. NERACA

BIDDOKKES POLDA BANTEN

NERACA

PER 30 SEPTEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	172.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	187.578	0
Persediaan	C.1.3	516.926.006	396.997.015
JUMLAH ASET LANCAR		689.113.584	396.997.015
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	11.449.327.867	11.921.360.452
Gedung dan Bangunan	C.2.2	1.037.844.658	1.037.844.658
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(10.044.099.024)	(10.373.967.728)
JUMLAH ASET TETAP		2.443.073.501	2.585.237.382
JUMLAH ASET		3.132.187.085	2.982.234.397
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.3		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.3.1	401.832.114	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.3.2	33.318.200	0
Uang Muka dari KPPN	C.3.3	172.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		607.150.314	0
EKUITAS			
EKUITAS	C.4	2.525.036.771	2.982.234.397
JUMLAH EKUITAS		2.525.036.771	2.982.234.397
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.132.187.085	2.982.234.397

III. LAPORAN OPERASIONAL

BIDDOKKES POLDA BANTEN

LAPORAN OPERASIONAL

PER 30 SEPTEMBER 2025 dan 30 SEPTEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.831.550.906	1.859.458.455
JUMLAH PENDAPATAN		1.831.550.906	1.859.458.455
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	4.784.566.118	4.467.362.257
Beban Persediaan	D.3	298.848.862	69.226.451
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.793.708.320	3.450.390.289
Beban Pemeliharaan	D.5	275.552.244	261.230.690
Beban Perjalanan Dinas	D.6	151.960.000	143.500.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	456.158.316	553.234.089
JUMLAH BEBAN		10.760.793.860	8.944.943.776
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8.929.242.954)	(7.085.485.321)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(8.929.242.954)	(7.085.485.321)
POS LUAR BIASA	D..9		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(8.929.242.954)	(7.085.485.321)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BIDDOKKES POLDA BANTEN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	2.982.234.397	3.665.269.551
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(8.929.242.954)	(7.085.485.321)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI			
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	(4.102.970)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	0	0
LAIN-LAIN	E.3.6	0	(4.102.970)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	8.472.045.328	6.768.506.125
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS		(457.197.626)	(321.082.166)
EKUITAS AKHIR	E.5	2.525.036.771	3.344.187.385

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Bid Dokkes Polda Banten

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Bid Dokkes Polda Banten merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran Kepolisian, kesehatan Kepolisian, rumah sakit dan poliklinik.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Bid Dokkes Polda Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Bid Dokkes Polda Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan [Bid Dokkes Polda Banten](#) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari [Bid Dokkes Polda Banten](#). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan [Bid Dokkes Polda Banten](#) adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN):

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus

pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,

diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah.
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat

dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 Tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 Tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Bid Dokkes Polda Banten Telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan karena adanya Pagu Minus Belanja Pegawai. Rincian revisi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Perubahan Dipa Tahun Anggaran 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	2.953.920.000	2.953.920.000
Jumlah Pendapatan	2.953.920.000	2.953.920.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.549.975.000	6.549.975.000
Belanja Barang	7.896.987.000	7.896.987.000
Belanja Modal	500.000.000	500.000.000

Jumlah Belanja	14.946.962.000	14.946.962.000
-----------------------	-----------------------	-----------------------

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp1.831.363.328

Realisasi Pendapatan Per 30 September 2025 adalah sebesar Rp1.831.363.328 atau mencapai 62,00 Persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.953.920.000. Pendapatan Bid Dokkes Polda Banten adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	1.809.626	0,00
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial Dan Keagamaan	2.953.920.000	1.829.553.702	61,94
Jumlah Pendapatan	2.953.920.000	1.831.363.328	62,00

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 September 2025 mengalami penurunan sebesar 1,50 persen dibandingkan 30 September 2024.

Hal ini disebabkan Adanya Penurunan Pendapatan Potongan SPM Sewa Rumah Dinas di Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.809.626	1.770.648	2,20
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial Dan Keagamaan	1.829.553.702	1.857.487.407	(1,50)
Jumlah Pendapatan	1.831.363.328	1.859.258.055	(1,50)

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp10.606.928.101

Realisasi Belanja Bid Dokkes Polda Banten Per 30 September 2025 adalah sebesar Rp10.606.928.101 atau mencapai 70,96%, dari Anggaran belanja sebesar Rp14.946.962.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.549.975.000	4.382.734.004	66,91
Belanja Barang	7.896.987.000	5.726.499.662	72,51
Belanja Modal	500.000.000	497.694.435	99,54
Total Belanja Bruto	14.946.962.000	10.606.928.101	70,96

Pegembalian	(0)	(0)	0,00
Jumlah Belanja Netto	14.946.962.000	10.606.928.101	70,96

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir Per 30 September 2025 mengalami kenaikan sebesar 22,66 persen dari 30 September 2024.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang Persediaan dan Belanja Perjalanan Dinas di Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja

TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	%
Belanja Pegawai	4.382.734.004	4.079.659.596	7,43
Belanja Barang	5.726.499.662	4.377.768.998	30,81
Belanja Modal	497.694.435	189.800.000	162,22
Jumlah Belanja	10.606.928.101	8.647.228.594	22,66

B.3 Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja Pegawai
Rp4.382.734.004*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.382.734.004 dan Rp4.079.659.596. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 September 2025 mengalami kenaikan sebesar 7,43 persen dari Per 30 September 2024.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan Belanja Pegawai di Tahun 2025 berupa Gaji Pokok Polri.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.348.835.316	1.418.639.118	(4,92)
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	3.016.363.688	2.640.982.520	14,21
Belanja Lembur	17.535.000	20.040.000	(12,50)
Total Belanja Pegawai Bruto	4.382.734.004	4.079.661.638	7,43
Pengembalian Belanja Pegawai	(0)	(2.042)	(100,00)
Jumlah Belanja Pegawai Netto	4.382.734.004	4.079.659.596	7,43

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang
Rp5.726.499.662

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.726.499.662 dan Rp4.377.768.998.

Realisasi Belanja Barang Per 30 September 2025 mengalami kenaikan sebesar 30,81 persen dari Per 30 September 2024.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan Realisasi Belanja Barang Persediaan dan Belanja Perjalanan Dinas di Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	%
Belanja Barang Operasional	4.588.565.080	3.250.580.849	41,16
Belanja Barang Non Operasional	155.708.740	183.503.490	(15,15)
Belanja Barang Persediaan	538.597.298	523.648.019	2,85
Belanja Jasa	16.116.300	16.305.950	(1,16)
Belanja Pemeliharaan	275.552.244	261.230.690	5,48
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	151.960.000	142.500.000	6,64
Total Belanja Barang Bruto	5.726.499.662	4.377.768.998	30,81
Pengembalian Belanja Barang	(0)	(0)	0,00
Jumlah Belanja Barang Netto	5.726.499.662	4.377.768.998	30,81

B.5 Belanja Modal

*Realisasi Belanja Modal
Rp497.694.435*

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp497.694.435 dan Rp189.800.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Per 30 September 2025 mengalami kenaikan sebesar 162,22 persen dari Per 30 September 2024.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan dukungan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

30 September 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	497.694.435	189.800.000	162,22
Total Belanja Modal Bruto	497.694.435	189.800.000	162,22
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal Netto	497.694.435	189.800.000	162,22

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp497.694.435

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp497.694.435 dan Rp189.800.000.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 September 2025 mengalami kenaikan sebesar 162,22 persen dari Per 30 September 2024.

Hal ini disebabkan adanya kenaikan dukungan Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 30 September 2025	Realisasi 30 September 2024	%
Alat Pengolah Air Limbah	250.000.000	0	0,00
Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	156.000.000	0	0,00
Kursi Gynecologi	9.300.000	0	0,00
Food Trolley	8.200.000	0	0,00
Tensimeter	11.700.000	0	0,00
Microskop Binocular	7.600.000	0	0,00
Lap Top	0	123.000.000	-100,00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	21.000.000	-100,00
Total Belanja Bruto	442.800.000	144.000.000	207,50
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Jumlah Belanja Netto	442.800.000	144.000.000	207,50

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Rp689.113.584

Jumlah Aset Lancar Bid Dokkes Poldas Banten Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp689.113.584 dan Rp396.997.015.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp172.000.000*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bid Dokkes Poldas Banten Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp172.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut

Tabel C.1.1

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

30 September 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	103.805.650	0
Bank	21.466.450	0
Jumlah	172.000.000	0

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp187.578*

Piutang Bukan Pajak Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp187.578 dan Rp0.

Tabel C.1.2

Rincian Piutang Bukan Pajak

30 September 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	187.578	0
Jumlah	187.578	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

C.1.3. Persediaan

Persediaan Rp516.926.006 Nilai Persediaan Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp516.926.006 dan Rp396.997.015.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.3

Rincian Persediaan

30 September 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Persediaan	30 September 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	516.599.666	396.670.675
Persediaan Lainnya	326.340	326.340
Jumlah	516.926.006	396.997.015

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap
Rp2.443.073.501*

Saldo Aset Tetap Bid Dokkes Polda Banten Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.443.073.501 dan Rp2.585.237.382

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp11.449.327.867

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp11.449.327.867 dan Rp11.921.360.452.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.2.1

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	11.921.360.452
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	966.504.647
Mutasi Kurang :	
Saldo Per 30 September 2025	12.887.865.099
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2025	(9.878.318.986)
Nilai Buku Per 30 September 2025	3.009.546.113

Mutasi Tambah/Kurang Peralatan dan Mesin antara lain adalah:

Pembelian berupa:

1. Alat Pengolah Air Limbah sebanyak 5 Buah sebesar Rp250.000.000;
2. Mikroskop Binocular sebanyak 1 Buah sebesar Rp7.600.000;
3. Food Trolley sebanyak 2 Buah sebesar Rp8.200.000;
4. Kursi Gynecologi sebanyak 1 Buah sebesar Rp9.300.000;
5. Tensimeter sebanyak 7 Buah sebesar Rp13.650.000;

6. Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine sebanyak 1 Buah sebesar Rp156.000.000;

7. Electrocardiograph sebanyak 1 Buah sebesar Rp52.944.435;

Transfer Masuk berupa:

Lap Top sebanyak 1 Buah sebesar Rp40.000.000;

Transfer Keluar berupa:

1. Kursi Gynecologi sebanyak 1 Buah sebesar Rp9.300.000;

2. Food Trolley sebanyak 1 Buah sebesar Rp4.100.000;

3. Tensimeter sebanyak 4 Buah sebesar Rp7.800.000;

4. Mobil Ambulance sebanyak 1 Unit sebesar Rp424.000.000;

5. Pick Up sebanyak 1 Unit sebesar Rp364.527.020;

6. Alat Pengolah Air Limbah sebanyak 4 Buah sebesar Rp200.000.000;

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin beserta Akumulasi Penyusutannya per 30 September 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp1.037.844.658

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp1.037.844.658 dan Rp1.037.844.658.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.2.2

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	1.037.844.658
Mutasi Tambah :	
Mutasi Kurang :	
Saldo Per 30 September 2025	1.037.844.658
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2025	(165.780.038)
Nilai Buku Per 30 September 2025	872.064.620

Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 30 September 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp10.044.099.024 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah **Rp10.044.099.024** dan **Rp10.373.967.728** Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Kontruksi Dalam Pengerjaan(KDP).

Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 September 2025.

Tabel C.2.3

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	11.449.327.867	9.878.318.986	1.571.008.881
2.	Gedung dan Bangunan	1.037.844.658	165.780.038	872.064.620
	Jumlah	12.487.172.525	10.044.099.024	2.443.073.501

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp607.150.314 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp607.150.314 dan Rp0.

C.3.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp401.832.114 Utang kepada Pihak Ketiga Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp401.832.114 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada lingkup Bid Dokkes Polda Banten Per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.1

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	401.832.114
	Total	401.832.114

C.3.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp33.318.200

Utang Yang Belum Ditagihkan Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp33.318.200 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan pada lingkup Bid Dokkes Polda Banten Per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.3.2

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Utang Belum Diterima Tagihannya	33.318.200

	Total	33.318.200
--	--------------	-------------------

C.3.3. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN
Rp172.000.000*

Uang Muka dari KPPN per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp172.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.4. Ekuitas

Ekuitas Rp2.525.036.771.

Ekuitas Per 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.525.036.771 dan Rp2.982.234.397. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp1.831.550.906

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah sebesar Rp1.831.550.906 dan Rp1.859.458.455. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.997.204	1.971.048	1,33
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial Dan Keagamaan	1.829.553.702	1.857.487.407	(1,50)
Jumlah Pendapatan	1.831.550.906	1.859.458.455	(1,50)

Pendapatan PNB pada Periode 30 September 2025 merupakan Pendapatan Potongan SPM Sewa Rumah Dinas.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp4.784.566.118

Jumlah Beban Pegawai pada periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.784.566.118 dan Rp4.467.362.257. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.457.043.048	1.534.975.732	(5,08)
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	3.309.988.070	2.912.346.525	13,65
Beban Lembur	17.535.000	20.040.000	(12,50)
Jumlah Beban Pegawai	4.784.566.118	4.467.362.257	7,10

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp298.848.862*

Jumlah Beban Persediaan pada periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp298.848.862 dan Rp69.226.451. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	298.848.862	69.226.451	331,70
Jumlah Beban Persediaan	298.848.862	69.226.451	331,70

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa
Rp4.793.708.320*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.793.708.320 dan Rp3.450.390.289. Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	64.134.500	21.355.230	200,32
Beban Pengadaan Bahan Makanan	60.069.600	58.116.800	3,36
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	68.580.000	50.784.000	35,04
Beban Barang Operasional Lainnya	4.429.099.180	3.120.324.819	41,94
Beban Bahan	140.308.740	180.503.490	(22,27)
Beban Honor Output Kegiatan	15.400.000	3.000.000	413,33
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	16.116.300	16.305.950	(1,16)

Jumlah Beban Barang dan Jasa	4.793.708.320	3.450.390.289	38,93
------------------------------	---------------	---------------	-------

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp275.552.244*

Jumlah Pemeliharaan 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp275.552.244 dan Rp261.230.690. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	40.000.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	275.552.244	221.230.690	24,55
Jumlah Beban Pemeliharaan	275.552.244	261.230.690	5,48

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas
Rp151.960.000*

Beban Perjalanan Dinas periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp151.960.000 dan Rp143.500.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	36.160.000	88.300.000	(59,05)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.800.000	31.200.000	(33,33)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	24.000.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	95.000.000	0	0,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	151.960.000	143.500.000	5,90

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp456.158.316

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp456.158.316 dan Rp553.234.089. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	445.443.388	542.519.161	(17,89)

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.714.928	10.714.928	0,00
Jumlah Beban Penyusutan	456.158.316	553.234.089	(17,55)
Beban Amortisasi Software	0	0	0,00
Beban Amortisasi Lisensi	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Pemerintah	0	0	0,00
Jumlah Beban Amortisasi	0	0	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	456.158.316	553.234.089	(17,55)

D.8. Beban Penyisihan Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Tidak Tertagih Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Tidak Tertagih

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Tunjangan	0	0	0,00

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Jumlah Beban Penyisihan Tidak Tertagih	0	0	0,00

D.9. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Rp0

Pos Surplus Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Per 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

Triwulan III Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	30 September 2025	30 September 2024	%
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00
Jumlah Surplus/Defisit Penyelesaian Jangka Panjang	0	0	0,00
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00

Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0,00
JUMLAH SUPRLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0,00

D.10. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa periode 30 September 2025 dan 30 September 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp2.982.234.397 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.982.234.397 dan Rp3.665.269.551.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Defisit LO
Rp8.929.242.954 Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.929.242.954 dan Rp7.085.485.321. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi Rp.0 Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rincian Koreksi Nilai Persediaan 30 September 2025

No	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Amunisi	0
3.	Suku Cadang	0

E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi atas reklasifikasi digunakan untuk menyajikan akun koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi reklasifikasi masuk dan keluar BMN dari Aplikasi Sakti Modul persediaan dan Modul Aset.

Tabel 3.3

Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi 30 September 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Persediaan	0
Peralatan dan Mesin	0
Jumlah	0

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.5. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi 30 September 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	(0)
Akum.Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Akum.Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Aset Tetap Renovasi	(0)
Kontruksi Dalam Pengerjaan	(0)
Aset Tetap Tidak Digunakan	0
Akum.Penyusutan Aset Tetap Tidak Digunakan	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Jumlah	0

E.3.6. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp(4.102.970). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi

atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 3.6

Rincian Koreksi Lain-Lain 30 September 2025

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Lainnya	0
Ekuitas Transaksi Lainnya	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp8.472.045.328

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.472.045.328 dan Rp6.768.506.125. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel. 4

Rincian Transaksi Antar Entitas 30 September 2025

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.606.928.101
Diterima dari Entitas Lain	(1.831.363.328)
Transfer Masuk	25.000.000
Transfer Keluar	(328.519.445)
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(0)

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung TAYL	0
Jumlah	Rp8.472.045.328

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri-dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025, DDEL sebesar Rp1.831.363.328 sedangkan DKEL sebesar Rp10.606.928.101.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 sebesar Rp25.000.000 terdiri dari:

Tabel.4.2

Transfer Masuk 30 September 2025

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Persediaan	Satker Polri/Polda Banten	124.539.715
2.	Peralatan dan Mesin	Satker Polri/Polda Banten	966.504.647
3.	Penyusutan Peralatan dan Mesin	Satker Polri/Polda Banten	(941.504.647)
4.	Gedung dan Bangunan	Satker Polri/Polda Banten	0

5.	Penyusutan Gedung dan Bangunan	Satker Polri/Polda Banten	(0)
6.	Software	Satker Polri/Polda Banten	0
7.	Penyusutan Amortisasi Software	Satker Polri/Polda Banten	(0)
8.	Lisensi	Satker Polri/Polda Banten	0
9.	Penyusutan Lisensi	Satker Polri/Polda Banten	(0)

Sedangkan Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 sebesar Rp328.519.445 terdiri dari:

Tabel 4.2

Transfer Keluar TA 2024

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Persediaan	Satker Polri/Polda Banten	0
2.	Peralatan dan Mesin	Satker Polri/Polda Banten	0
3.	Penyusutan Peralatan dan Mesin	Satker Polri/Polda Banten	(0)
4.	Gedung dan Bangunan	Satker Polri/Polda Banten	0
5.	Penyusutan Gedung dan Bangunan	Satker Polri/Polda Banten	(0)
6.	Software	Satker Polri/Polda Banten	0
7.	Penyusutan Software	Satker Polri/Polda Banten	(0)
8.	Lisensi	Satker Polri/Polda Banten	0
9.	Penyusutan Lisensi	Satker Polri/Polda Banten	(0)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung untuk

periode yang berakhir pada 30 September 2025 sebesar Rp0.yaitu terdiri dari berupa hibah uang sebesar Rp0 dan berupa hibah barang sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Pengesahan Hibah Langsung 30 September 2025

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	PT.XXX	Barang	0
2.	H.XXX	Barang	0
3.	H.BBB	Barang	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung 30 September 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp2.525.036.771

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.525.036.771 dan Rp3.344.187.385.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Satker Bid Dokkes Poldas Banten pada Penyusunan Laporan Keuangan 30 September 2025 telah melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN melalui Aplikasi Monsakti.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

Bid Dokkes Poldas Banten Telah membuat Surat Keputusan Nomor : Kep/2/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

F.3. Pengelolaan Rekening

Bid Dokkes Poldas Banten memiliki Rekening Bendahara Pengeluaran/BPG 020 Biddokkes Poldas Banten dengan Nomor Rekening 652376695841000 Pada Bank BRI Kantor Pusat dengan Nomor Persetujuan S-2376/WPB.12/KP.03/2020 Tanggal 12 November 2020 dengan Saldo Per 30 September 2025 sebesar Rp21.466.450,00.

F.4. Prioritas Nasional (PN)

LAPORAN REKENING BIDDOKKES POLDA BANTEN S.D TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025